



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARIPURNA POERWOKO SUGARDA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KERJA SAMA DAN ALUMNI
3. NHK : 640303

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.914.500.000

1. Tanah Seluas 634 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.507.500.000
2. Tanah Seluas 1068 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.745.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 252.000.000
4. Tanah Seluas 241 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 610.100.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, HONDA JIP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. MOBIL, MERCEDES C 230 Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000
5. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.170.981.007**F. HARTA LAINNYA** Rp. 500.000.000



Sub Total	Rp.	10.206.881.007
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.206.881.007

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.